

Program Makan Bergizi Gratis di Tengah Krisis Food Waste

Siti Pitriani ¹, Chalila Putri Komara ², Deasy Silvyia Sari ³, Dina Yulianti ⁴

chalila22001@mail.unpad.ac.id

deasy.silvyia@unpad.ac.id

siti22024@mail.unpad.ac.id

dina.yulianti@unpad.ac.id

Abstract

The phenomenon of food waste has become a pressing global issue, as reflected in its inclusion in the Sustainable Development Goals (SDGs) under Goal 12: Responsible Consumption and Production. Ironically, despite various efforts to combat global hunger, millions of tons of food continue to be wasted. In Indonesia, the government launched the Free Nutritious Meal (Makan Bergizi Gratis/MBG) program in early 2025, aiming to improve the nutritional intake of schoolchildren and strengthen national food security. However, the initial implementation of this program has raised new problems, particularly the increase in food waste due to poor meal quality and lack of student acceptance. This study aims to analyze the implementation dynamics of the MBG program within the framework of food security and its unintended consequences on food waste. Using a netnographic approach and thematic content analysis, data were collected from digital platforms such as social media and online news portals. The findings reveal a significant gap between the program's objectives and its on-the-ground execution, especially in terms of food access, utilization, and stability. This study recommends a policy evaluation based on public feedback and advocates for the redesign of food programs to be more participatory, sustainable, and environmentally responsive.

Keywords: food waste, food security, Free Nutritious Meal, food policy, netnography, responsible consumption

^{1,2,3,4} Faculty of Social and Political Science Universitas Padjadjaran

Pendahuluan

Persoalan Food Waste kini telah menjadi isu global dengan dampak yang semakin meluas hingga akhirnya masuk ke dalam agenda Sustainable Development Goals (SDGs) nomor 12 atau Responsible Consumption and Production (The Global Goals, 2024) Menurut FAO, sekitar sepertiga dari makanan yang diproduksi untuk konsumsi manusia justru terbuang sia-sia ke tempat pembuangan akhir (TPA) (Gustavsson et al., 2011) Ironisnya, meskipun berbagai upaya telah dilakukan, kelaparan global masih menjadi tantangan besar bagi umat manusia. Di tahun 2023, diperkirakan sebanyak 757 juta orang dari seluruh dunia yang menderita kelaparan.

Seperti yang tercantum dalam laporan PBB “Keamanan Pangan dan Gizi di Dunia 2024” (Malteser Internasional, n.d.) atau dalam laporan Global Report on Food Crises (GRFC) 2024 yang menyoroti kondisi 59 negara yang menghadapi krisis pangan pada tahun 2023 dengan total lebih dari 281 juta orang dalam tingkat kerawanan pangan akut (IPC/CH fase 3 atau lebih tinggi) terutama bagi orang-orang yang berada di beberapa negara Afrika, bahkan sampai ke Asia dan Amerika Latin. Di Indonesia (Meliputi wilayah Surabaya, Sukomanunggal, Cianjur, Cirebon, Pekalongan, Purbalingga, Buleleng, Karangasem, Bogor, dan Depok) tercatat sekitar 534 kilogram/tahun food waste ditemukan pertahunnya (UNEP, 2024) Sementara, pada 5 Januari 2025, program Makan Bergizi Gratis (MBG) mulai diluncurkan (Digest, n.d.)

Makan Bergizi Gratis (MBG) merupakan sebuah program pemerintah di era Presiden Prabowo Subianto yang bertujuan untuk meningkatkan sumber daya manusia dengan memperbaiki asupan gizi anak-anak sekolah (SD sampai SMA). Di samping itu, program ini juga dirancang untuk mendukung pemberdayaan UMKM, memperkuat ekonomi rakyat, dan mendorong pertumbuhan ekonomi nasional (DI, 2025) Namun sayangnya, pada hari pertama pelaksanaan program Makan Bergizi Gratis (MBG), sejumlah kendala dan keluhan mulai muncul, baik dari para siswa maupun guru pendamping. Menu yang disajikan dinilai terlalu sederhana, tanpa adanya kehadiran sumber protein hewani, dan sayurannya pun diolah secara seadanya. Bahkan, Kepala POM, Ikrar Taruna, menemukan sayuran yang sudah basi. Beberapa siswa juga mengeluhkan rasa makanan yang kurang enak, sehingga mereka enggan menghabiskannya. Akibatnya, program makan siang gratis ini justru menimbulkan persoalan baru, yaitu meningkatnya food waste (Digest, n.d)

Penelitian ini bertujuan untuk mengkaji program Makan Bergizi Gratis (MBG) yang tengah berjalan sebagai upaya dalam mencegah stunting melalui pemberian makan kepada anak sekolah, namun dalam prakteknya justru menimbulkan persoalan baru, yaitu peningkatan limbah makanan (food waste). Meskipun program ini dirancang dengan tujuan yang baik, yaitu meningkatkan kualitas sumber daya manusia dan mendukung ekonomi kerakyatan, tapi realitas di lapangan menunjukkan adanya tantangan serius dalam pelaksanaannya, mulai dari menu yang kurang diminati hingga distribusi yang tidak efektif. Kondisi ini menyebabkan banyak makanan yang akhirnya tidak dikonsumsi oleh siswa dan menjadi terbuang sia-sia.

Oleh karena itu, penelitian ini tidak hanya menyoroti implementasi kebijakan dan hambatan program MBG, tapi juga dampak negatifnya terhadap lingkungan serta bagaimana kebijakan pangan yang seharusnya menyelesaikan masalah malah memperparah krisis yang ada. Untuk menjelaskan hal tersebut, penelitian ini menggunakan pendekatan deskriptif kualitatif. Metode ini memungkinkan peneliti untuk menggali secara mendalam mengenai persepsi para pemangku kebijakan

melalui studi literatur dan analisis kebijakan. Dengan pendekatan ini, penelitian akan memetakan dinamika pelaksanaan program MBG di lapangan, serta mengidentifikasi titik-titik kegagalan yang berkontribusi terhadap meningkatnya limbah makanan. Harapannya, kajian ini dapat menjadi bahan evaluasi kritis atas kebijakan serupa, serta mendorong penyusunan program pangan yang lebih berkelanjutan, adil, dan sensitif terhadap krisis lingkungan yang tengah dihadapi.

Metode Penelitian

Penelitian ini menggunakan pendekatan netnografi, yaitu metode kualitatif yang dikembangkan untuk mempelajari perilaku dan interaksi sosial dalam komunitas daring (Kozinets, 2010). Netnografi dianggap relevan dalam konteks penelitian ini karena perbincangan mengenai program Makan Bergizi Gratis (MBG) dan isu food waste banyak berlangsung di ruang digital, seperti media sosial, forum diskusi, dan platform berita daring. Wacana publik di dunia maya menjadi refleksi penting atas persepsi masyarakat terhadap kebijakan tersebut, sekaligus menjadi sumber data otentik mengenai respons warga terhadap implementasi program di lapangan.

Dalam penelitian ini, teknik observasi partisipatif pasif secara daring digunakan untuk mengumpulkan data. Peneliti mengamati percakapan di platform seperti Twitter (X) dan kolom komentar di portal berita nasional seperti Kompas.com, Detik.com, dan CNN Indonesia, yang memuat pemberitaan tentang MBG, sejak masa awal peluncuran program pada 5 Januari 2025 hingga akhir Januari 2025. Kata kunci yang digunakan untuk menelusuri data antara lain: “makan bergizi gratis”, “MBG”, “makanan basi MBG”, “program makan siang sekolah”, dan “food waste sekolah”.

Data yang dikumpulkan berupa unggahan teks, tangkapan layar, komentar, dan diskusi pengguna yang menunjukkan persepsi, kritik, keluhan, maupun dukungan terhadap pelaksanaan program MBG. Untuk menjaga etika penelitian, identitas pengguna media sosial disamarkan dan hanya informasi yang dipublikasikan secara terbuka yang digunakan. Peneliti tidak melakukan intervensi, seperti komentar atau keterlibatan langsung dalam diskusi, melainkan hanya bertindak sebagai pengamat.

Data dianalisis menggunakan analisis isi tematik (thematic content analysis) untuk mengidentifikasi pola-pola tematik yang muncul, seperti: (1) persepsi terhadap kualitas makanan, (2) pengalaman langsung siswa atau guru, (3) keluhan terkait food waste, (4) pandangan terhadap efektivitas program, dan (5) usulan perbaikan. Analisis ini kemudian dikaitkan dengan kerangka konsep ketahanan pangan, terutama pada aspek akses, pemanfaatan, dan stabilitas.

Dengan pendekatan ini, penelitian berupaya memahami tidak hanya apa yang dikatakan oleh publik tentang MBG, tetapi juga bagaimana persepsi tersebut mencerminkan dinamika implementasi kebijakan dan potensi dampaknya terhadap krisis food waste. Netnografi memberikan sudut pandang alternatif terhadap kebijakan pangan yang kerap dinilai dari atas ke bawah (top-down), dengan memberi ruang bagi suara-suara dari bawah (bottom-up), terutama dari komunitas digital yang semakin aktif dalam menyuarkan pengalaman dan kritik sosial.

Hasil dan Pembahasan

Krisis food waste dan Implikasinya terhadap Ketahanan Pangan Program Makan Bergizi Gratis (MBG) yang digagas dalam pemerintahan Prabowo Subianto merupakan langkah strategis yang tidak hanya menyorot isu ketahanan pangan dan gizi, tetapi juga memainkan peran penting dalam mengatasi berbagai tantangan sosial, ekonomi, dan pembangunan manusia di Indonesia. Dalam pandangan A. Junaedi Karso, program ini tidak bisa dipahami secara sempit sebagai kebijakan bantuan sosial semata. Sebaliknya, ia menjelaskan bahwa MBG merupakan bagian integral dari visi besar menuju Indonesia Emas 2045, yakni cita-cita mewujudkan Indonesia sebagai negara maju, berdaya saing tinggi, dan memiliki kualitas sumber daya manusia yang unggul.

Program ini menyorot anak-anak sekolah dan kelompok rentan lainnya sebagai penerima manfaat utama, dengan tujuan utama memperbaiki asupan gizi harian, menurunkan angka stunting, meningkatkan konsentrasi belajar, serta memperkuat daya tahan tubuh anak-anak Indonesia. Hal ini penting mengingat bahwa kualitas gizi di usia dini berkorelasi erat dengan kemampuan kognitif, produktivitas kerja di masa depan, dan kesehatan jangka panjang. Dengan memperkuat fondasi ini sejak dini, negara secara langsung berinvestasi dalam pembangunan sumber daya manusia yang menjadi tulang punggung pertumbuhan ekonomi nasional. Lebih dari itu, Program MBG memiliki dimensi strategis dalam pemberdayaan ekonomi lokal. Program ini dirancang untuk melibatkan petani lokal, peternak, nelayan, serta pelaku UMKM sebagai penyedia bahan pangan dan jasa pengolahan makanan. Dengan demikian, program ini tidak hanya memberi manfaat gizi kepada anak-anak, tetapi juga menciptakan rantai nilai ekonomi di tingkat lokal dan memperkuat daya tahan ekonomi masyarakat akar rumput. Dalam skala nasional, hal ini dapat mendorong distribusi ekonomi yang lebih merata serta memperkuat ketahanan pangan nasional melalui pendekatan berbasis komunitas.

Pelaksanaan program ini juga menuntut koordinasi lintas sektor, mulai dari kementerian/lembaga di tingkat pusat hingga pemerintah daerah, sekolah, serta kelompok masyarakat sipil. Hal ini menciptakan peluang bagi penguatan tata kelola pemerintahan yang partisipatif serta peningkatan kapasitas lembaga-lembaga lokal dalam mengelola program publik secara transparan dan akuntabel. Dengan keterlibatan berbagai aktor, program MBG dapat menjadi model kolaboratif dalam implementasi kebijakan publik yang bersifat inklusif.

Dalam konteks geopolitik dan perubahan iklim global, ketersediaan dan akses terhadap makanan bergizi menjadi isu strategis yang semakin mendesak. Oleh karena itu, Program Makan Bergizi Gratis juga dapat dilihat sebagai bagian dari komitmen Indonesia terhadap Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (SDGs), khususnya tujuan nomor 2 (mengakhiri kelaparan) dan nomor 3 (menjamin kehidupan sehat dan kesejahteraan bagi semua).

Indonesia memiliki sumber daya yang cukup untuk menjamin ketahanan pangan. Pangan merupakan hak asasi manusia yang fundamental sekaligus kebutuhan dasar manusia yang paling vital. Oleh karena itu, negara seperti Indonesia berupaya untuk memastikan bahwa warganya memiliki akses terhadap pangan dengan mendorong berbagai kegiatan yang bertujuan untuk mencapai ketahanan pangan dan gizi yang berkelanjutan.

Dalam kerangka ketahanan nasional, kebijakan ketahanan pangan nasional juga harus dilaksanakan secara menyeluruh dan terintegrasi guna meningkatkan kemandirian ekonomi dan daya saing. Lima provinsi dengan skor tertinggi berdasarkan peringkat Indeks Ketahanan Pangan (IKP) provinsi adalah Sumatera Barat (83,22), Sulawesi Selatan (83,36), Bali (87,65), Jawa Tengah (84,80), dan DKI Jakarta (83,80).

Menurut Badan Pangan Nasional (2023), Papua (42,27), Papua Barat (47,95), Maluku Utara (62,34), Maluku (64,37), dan Kepulauan Riau (65,10) merupakan lima provinsi dengan skor terendah. Intervensi sebaiknya difokuskan pada wilayah yang dianggap rawan pangan dan pada aspek-aspek yang terus menunjukkan kinerja rendah, guna mempercepat pencapaian ketahanan pangan dan gizi.

Food waste atau sampah makanan merupakan permasalahan krusial yang mengancam ketahanan pangan di tingkat nasional dan regional, khususnya di kawasan Asia Tenggara. Menurut United Nations Environment Programme (UNEP), Indonesia merupakan negara dengan jumlah food waste rumah tangga terbanyak di Asia Tenggara, yaitu mencapai 14,73 juta ton per tahun (Triono & Nizmi, 2023, 117). Tingginya jumlah makanan yang terbuang ini berbanding terbalik dengan kenyataan bahwa jutaan penduduk Indonesia masih mengalami kelaparan dan kekurangan gizi, termasuk stunting pada anak-anak (Hidayat et al., 2020, 172).

Ketahanan pangan sendiri mencakup empat pilar utama: ketersediaan, akses, pemanfaatan, dan stabilitas pangan. Peningkatan food waste berdampak langsung pada keempat pilar ini. Dari sisi ketersediaan, food waste menyebabkan berkurangnya pasokan pangan yang seharusnya bisa dikonsumsi. Ketika makanan terbuang, maka upaya dalam produksi menjadi sia-sia, termasuk penggunaan lahan, air, dan tenaga kerja (Triono & Nizmi, 2024, 53). Bahkan, FAO memperkirakan bahwa untuk memenuhi kebutuhan populasi global tahun 2050, dunia memerlukan tambahan 60% pasokan pangan, sebuah tantangan besar jika food waste tidak ditekan (Triono & Nizmi, 2024, 44).

Dari sisi akses, food waste memperburuk ketimpangan. Banyak keluarga tidak mampu membeli makanan bergizi, sementara makanan yang layak justru dibuang oleh mereka yang memiliki daya beli lebih tinggi. Hal ini turut memperbesar jurang kemiskinan dan memperparah kerawanan pangan (Triono & Nizmi, 2024, 44). Dampaknya, prevalensi stunting di Indonesia pada 2018 mencapai 30,8% untuk anak usia di bawah lima tahun, menjadikan Indonesia sebagai negara dengan tingkat stunting tertinggi di Asia Tenggara.

Pemanfaatan pangan yang tidak optimal akibat food waste menghambat pencapaian status gizi yang baik. Data menunjukkan bahwa kebiasaan makan berlebihan dan perilaku konsumtif konsumen di restoran menjadi penyebab utama food waste (Hidayat et al., 2020, 178). Penelitian di Surabaya menunjukkan bahwa sekitar 892 porsi makanan terbuang dalam sebulan dari restoran mitra Garda Pangan, meskipun makanan tersebut masih layak konsumsi (Hidayat et al., 2020, 176).

Stabilitas pangan juga terganggu karena food waste memperbesar risiko fluktuasi pasokan pangan, terutama saat terjadi bencana alam, perubahan iklim, atau gangguan distribusi. Dalam jangka panjang, ketergantungan pada impor dan ketidakseimbangan distribusi pangan dapat memperlemah sistem pangan nasional (Triono & Nizmi, 2023, 117).

Secara ekonomi, food waste menimbulkan kerugian besar. Indonesia menempati posisi ketiga dunia sebagai penghasil food waste terbanyak setelah Meksiko dan Arab Saudi, dengan kerugian ekonomi diperkirakan mencapai 4-5% dari Produk Domestik Bruto (PDB) Indonesia (Triono & Nizmi, 2023, 48). Selain itu, dampak lingkungan juga signifikan karena food waste berkontribusi terhadap peningkatan emisi gas rumah kaca dan penggunaan sumber daya yang tidak efisien.

Peran Program Makan Bergizi Gratis

Program Makan Bergizi Gratis (MBG) yang digagas dalam pemerintahan Prabowo Subianto merupakan langkah strategis yang tidak hanya menyoal isu ketahanan pangan dan gizi, tetapi juga berperan dalam menjawab berbagai tantangan sosial dan ekonomi yang dihadapi Indonesia saat ini. A. Junaedi Karso menguraikan secara menyeluruh bagaimana program ini bukan sekadar kebijakan bantuan, tetapi menjadi bagian dari gerakan besar menuju pembangunan manusia Indonesia yang berkualitas, sehat, dan produktif dalam kerangka visi Indonesia Emas 2045.

Salah satu peran utama program MBG adalah mengatasi masalah gizi dan kesehatan, khususnya pada anak-anak sekolah, balita, ibu hamil, dan ibu menyusui. Melalui penyediaan makanan bergizi secara rutin, pemerintah berupaya menurunkan angka stunting, malnutrisi, serta berbagai persoalan kesehatan akibat kekurangan asupan gizi. Dalam jangka panjang, pemenuhan gizi sejak dini diharapkan dapat menciptakan generasi yang lebih sehat dan cerdas. Pendidikan pun turut menjadi sasaran strategis dari program ini. Anak-anak yang mendapatkan makanan bergizi di sekolah memiliki konsentrasi dan energi yang lebih baik untuk belajar, yang pada akhirnya meningkatkan prestasi pendidikan mereka.

Program ini juga dipandang sebagai upaya membangun solidaritas sosial melalui gerakan partisipatif. Pemerintah tidak dapat menjalankan program berskala besar ini sendirian, sehingga pelibatan sektor swasta, komunitas lokal, dan berbagai elemen masyarakat menjadi sangat penting. Konsep dapur umum bergizi gratis yang tersebar di berbagai wilayah memungkinkan keterlibatan masyarakat dalam penyediaan makanan, sekaligus mempererat gotong royong antar warga.

Namun di balik urgensi pelaksanaan Program Makan Bergizi Gratis, krisis food waste di Indonesia justru mengungkap ironi yang menyedihkan. Di satu sisi, jutaan masyarakat masih mengalami kekurangan gizi dan kesulitan mengakses makanan layak (Karso, 2025, 1). Namun di sisi lain, jumlah makanan yang terbuang setiap tahunnya mencapai angka yang mencengangkan. Krisis food waste ini mencerminkan buruknya sistem distribusi pangan nasional serta minimnya kesadaran kolektif terhadap nilai dan keberlanjutan pangan (Karso, 2025, 173).

Alih-alih menjadi peluang untuk mengurangi limbah makanan, program MBG berisiko menambah food waste jika tidak disertai dengan manajemen logistik dan pengawasan ketat (Karso, 2025, 80). Ketika makanan disediakan dalam skala besar tanpa akurasi data sasaran dan kebutuhan harian penerima, maka kelebihan produksi makanan sangat mungkin terjadi (Karso, 2025, 190). Dalam konteks ini, MBG bisa menjadi kebijakan yang kontraproduktif terhadap tujuan pengurangan limbah, jika hanya fokus pada kuantitas distribusi, bukan kualitas dan efisiensi pengelolaan pangan.

Krisis food waste seharusnya menjadi alarm keras bagi semua pihak bahwa masalah kelaparan di Indonesia bukan semata karena kekurangan produksi pangan, tetapi karena ketimpangan akses dan pemborosan sumber daya. Jika tidak ada

reformasi menyeluruh dalam tata kelola pangan nasional, maka program seambisius MBG pun bisa gagal memberikan dampak yang diharapkan, justru memperparah ketidakefisienan sistem pangan yang sudah rapuh. Integrasi Program dengan Pengurangan Food Waste

Berdasarkan analisis dokumen pelaksanaan program Makan Bergizi Gratis (MBG), ditemukan bahwa upaya integrasi program ini dengan agenda pengurangan food waste masih bersifat minimal dan belum sistematis. Meskipun program ini memiliki potensi besar dalam mengatur distribusi dan konsumsi makanan di lingkungan sekolah, pendekatan yang digunakan masih berfokus pada kuantitas distribusi pangan, bukan pada efisiensi dan keberlanjutan. Dalam pelaksanaan di beberapa sekolah dasar negeri di Jakarta dan Depok, misalnya, ditemukan bahwa banyak makanan tidak habis dikonsumsi oleh siswa karena beberapa alasan: rasa yang kurang familiar, porsi yang tidak sesuai usia, atau penyajian yang kurang menarik. Hal ini menyebabkan sisa makanan menumpuk dan pada akhirnya dibuang begitu saja tanpa ada sistem pengelolaan sisa makanan atau edukasi tentang konsumsi bijak.

Selain itu, tidak terdapat protokol standar yang diterapkan secara nasional mengenai pengolahan limbah makanan (food waste management), baik dalam bentuk bank makanan (food bank), redistribusi, maupun konversi limbah organik menjadi kompos. Hal ini menunjukkan bahwa integrasi antara program MBG dan pengurangan food waste belum menjadi satu kebijakan terpadu. Padahal, menurut Vittuari et al. (2023), program pangan publik dapat menjadi titik masuk strategis untuk menekan volume food waste jika dirancang dengan sistem logistik yang efisien, edukasi konsumsi, serta partisipasi komunitas dalam manajemen sisa pangan. Ketiadaan indikator evaluasi terkait limbah makanan juga menyulitkan pengukuran efektivitas program dalam kerangka keberlanjutan. Oleh karena itu, penguatan desain program MBG harus mempertimbangkan prinsip-prinsip pengelolaan food waste secara terintegrasi, dari proses penyediaan hingga konsumsi akhir, terutama di lingkungan institusi pendidikan.

Analisis dengan Perspektif Ketahanan Pangan

Jika dianalisis menggunakan kerangka empat pilar ketahanan pangan menurut FAO yaitu ketersediaan, akses, pemanfaatan, dan stabilitas. Program MBG memiliki kontribusi yang potensial namun juga tantangan serius. Dari sisi ketersediaan, program ini berhasil menyediakan makanan setiap hari bagi siswa, dan dalam beberapa kasus melibatkan produk lokal dari UMKM dan petani setempat, yang pada dasarnya memperkuat rantai pasok lokal. Namun, keberhasilan ketersediaan ini tidak selalu berbanding lurus dengan aspek akses. Beberapa sekolah di daerah terpencil mengalami keterlambatan distribusi atau kekurangan logistik, yang berarti tidak semua siswa mendapatkan akses yang merata terhadap makanan bergizi yang dijanjikan. Hal ini menunjukkan bahwa akses masih bersifat spasial dan tidak universal.

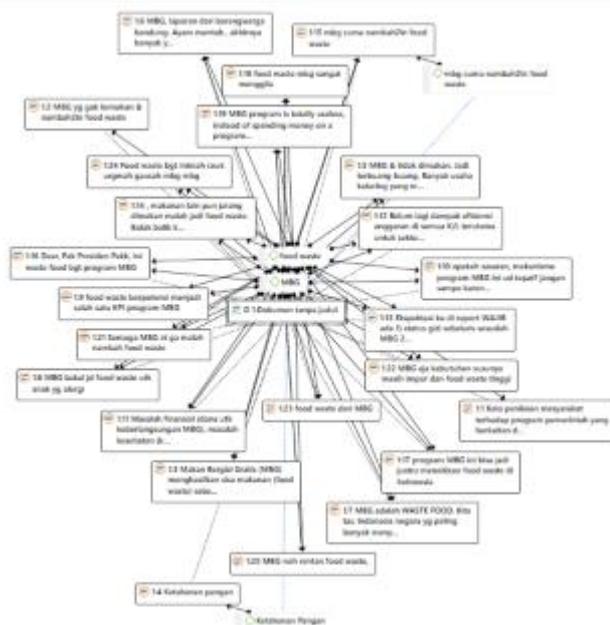
Dalam aspek pemanfaatan, yaitu bagaimana makanan dikonsumsi dan dimanfaatkan oleh tubuh, program MBG menghadapi tantangan dari segi kualitas gizi dan selera konsumsi anak. Ketidaksesuaian menu dengan kebiasaan makan lokal menyebabkan banyak makanan tidak dikonsumsi secara optimal dan akhirnya dibuang. Ini tidak hanya berdampak pada keberlanjutan, tetapi juga pada efektivitas intervensi gizi. Dalam aspek stabilitas, yaitu kontinuitas pasokan dan konsumsi dalam jangka panjang, program MBG masih menghadapi tantangan pembiayaan dan

pengawasan. Ketergantungan terhadap dana pusat dan belum adanya model pelibatan masyarakat atau swasta membuat program ini rentan secara politik dan administratif.

Ketiadaan kebijakan terpadu antara program MBG dan pengelolaan food waste juga memperlemah dimensi stabilitas ketahanan pangan, karena limbah yang berlebihan dapat memperbesar biaya logistik dan menimbulkan masalah lingkungan. Hal ini diperkuat oleh argumen Amartya Sen bahwa ketahanan pangan tidak hanya soal ketersediaan, tetapi terutama menyangkut kemampuan sistem distribusi dan keadilan akses terhadap pangan. Dengan demikian, program MBG hanya akan benar-benar berkontribusi pada ketahanan pangan jika pengelolaan konsumsi, limbah, dan gizi dilakukan secara holistik dan berkelanjutan.

Figure: 3.1 Hasil Coding Atlas.ti

Hasil analisis data dengan menggunakan ATLAS.ti menunjukkan bahwa program Makan Bergizi Gratis (MBG) mendapatkan beragam tanggapan dari masyarakat, khususnya terkait isu pemborosan makanan atau food waste. Dari peta jaringan kode yang dihasilkan, tampak bahwa terdapat kekhawatiran publik yang cukup besar bahwa implementasi program ini justru menghasilkan limbah makanan dalam jumlah signifikan. Narasi-narasi seperti "MBG cuma nambah-nambahin food waste" dan "Food waste MBG sangat mengerikan" menjadi indikasi kuat bahwa publik menilai program ini belum mampu menjawab persoalan distribusi dan konsumsi makanan secara efisien. Dalam banyak kasus, makanan yang tidak dikonsumsi oleh siswa akibat ketidaksesuaian selera, alergi, atau ketidaktepatan waktu pembagian, akhirnya dibuang dan menjadi limbah.



(Source: atlas.ti, 2025)

Kritik terhadap efektivitas program MBG juga mengemuka dalam bentuk ketidakpuasan terhadap alokasi anggaran negara. Beberapa kutipan menggambarkan bahwa publik merasa dana besar yang dikeluarkan pemerintah untuk program ini menjadi sia-sia karena tidak memberikan dampak yang nyata selain menambah persoalan baru. Narasi seperti "program MBG ini useless" dan "program MBG malah

jadi food waste" memperlihatkan adanya persepsi bahwa pemerintah belum memiliki perencanaan dan pelaksanaan yang matang. Mekanisme distribusi yang dipertanyakan, ketidakefisienan logistik, dan kekurangan dalam pengawasan juga menjadi catatan penting dalam temuan ini.

Lebih jauh, aspek sosial dan kesehatan juga turut menjadi sorotan. Masyarakat menyoroti bahwa tidak semua anak memiliki kebutuhan gizi yang sama atau bisa menerima makanan yang disediakan secara seragam, terlebih jika mereka memiliki alergi atau pantangan tertentu. Beberapa kutipan menyoroti bahwa anak-anak yang alergi atau memiliki gangguan pencernaan tertentu malah tidak dapat memanfaatkan makanan yang disediakan, sehingga makanan tersebut menjadi limbah. Di sisi lain, muncul kekhawatiran bahwa keberlanjutan program ini akan terganggu jika tidak disertai dengan perencanaan keuangan dan strategi kesehatan yang lebih inklusif.

Pandangan masyarakat yang terekam dalam jaringan kode ini juga menunjukkan kekecewaan terhadap program pemerintah yang dinilai tidak mempertimbangkan secara serius penilaian publik dan hasil evaluasi lapangan. Sebagian besar kritik memperlihatkan bahwa program MBG dianggap lebih sebagai beban ketimbang solusi, karena memperbesar potensi pemborosan makanan, dan pada akhirnya justru bertolak belakang dengan tujuan awalnya yaitu memperkuat ketahanan pangan. Kode "ketahanan pangan" yang muncul di bagian akhir jaringan memperlihatkan bahwa harapan publik terhadap program ini adalah adanya kontribusi terhadap stabilitas dan ketersediaan pangan, bukan sebaliknya.

Ironi dari program MBG terlihat dalam berbagai kutipan yang menyandingkan nama program dengan kenyataan pelaksanaannya di lapangan. Alih-alih memberikan manfaat maksimal bagi anak-anak sekolah, program ini dinilai oleh sebagian masyarakat sebagai program "waste food" karena gagal menyentuh akar permasalahan distribusi dan konsumsi makanan bergizi secara efisien. Dengan demikian, hasil analisis ini menggarisbawahi pentingnya perbaikan sistemik terhadap pelaksanaan program MBG, termasuk dalam aspek perencanaan gizi, distribusi makanan, pelibatan pihak sekolah dan orang tua, serta evaluasi menyeluruh berbasis data yang terbuka untuk publik.

Jika diperlukan, hasil ini dapat digunakan sebagai dasar perumusan kebijakan lanjutan atau advokasi publik untuk memastikan bahwa program MBG berjalan sesuai dengan prinsip efisiensi, keberlanjutan, dan pemenuhan hak anak terhadap makanan yang layak serta bergizi, tanpa menciptakan beban baru dalam bentuk limbah makanan yang tak tertangani.

Selain isu pemborosan makanan yang muncul kuat dalam temuan analisis data, jaringan kode dalam ATLAS.ti juga menunjukkan adanya kompleksitas dalam dinamika persepsi publik terhadap program MBG. Beberapa segmen masyarakat menyuarakan bahwa meskipun niat dasar dari program ini bersifat positif—yakni untuk memastikan anak-anak sekolah memperoleh asupan makanan bergizi secara gratis—namun implementasinya belum menyentuh dimensi partisipatif dari para pemangku kepentingan, terutama komunitas sekolah dan keluarga. Banyak kutipan menyoroti bahwa proses penyusunan menu dan penentuan jadwal distribusi dilakukan secara top-down, tanpa mempertimbangkan preferensi lokal, kearifan pangan daerah, serta kondisi sosial-ekonomi dari masing-masing satuan pendidikan.

Sebagai contoh, kutipan seperti “anak saya tidak suka makanan dari MBG, katanya hambar” atau “kok makanannya nggak sesuai sama makanan khas sini?” mengindikasikan kurangnya pelibatan masyarakat dalam tahap perancangan program. Hal ini diperkuat oleh munculnya kode-kode seperti “kurangnya konsultasi dengan sekolah”, “tidak sesuai budaya makan lokal”, dan “tidak mempertimbangkan selera anak”, yang menggambarkan adanya ketimpangan antara perancang kebijakan di pusat dengan realitas kebutuhan di tingkat akar rumput.

Kritik juga muncul terhadap kurangnya pendekatan berbasis data lokal. Dalam beberapa daerah, ditemukan bahwa sekolah belum memiliki sistem monitoring dan evaluasi (monev) yang terstruktur untuk menilai efektivitas distribusi makanan serta respon siswa terhadap menu yang disediakan. Beberapa kutipan menyatakan “tidak pernah ditanya suka atau tidak”, “makanannya dibuang karena nggak enak”, atau bahkan “anak-anak pulang masih lapar karena nggak dimakan”. Ini menunjukkan adanya kegagalan dalam membangun sistem umpan balik dua arah yang seharusnya menjadi fondasi dari kebijakan berbasis kebutuhan (*needs-based policy*). Tanpa adanya data yang relevan dan partisipasi pengguna akhir, program semacam MBG rentan mengalami stagnasi atau bahkan kontraproduktif terhadap tujuannya sendiri.

Lebih jauh, analisis menunjukkan bahwa dimensi ekonomi juga turut memperkuat narasi kritik terhadap program ini. Masyarakat mempertanyakan apakah biaya besar yang dikeluarkan negara—yang mencapai triliunan rupiah per tahun—sudah sebanding dengan hasilnya. Kritik semacam ini tidak hanya mencerminkan ketidakpuasan, namun juga kekhawatiran terhadap akuntabilitas penggunaan anggaran publik. Kode seperti “pemborosan anggaran negara”, “tidak transparan”, dan “tidak jelas hasilnya” menggambarkan persepsi bahwa MBG cenderung menjadi proyek populis, bukan solusi berbasis riset dan konsultasi multipihak.

Menariknya, terdapat juga suara minoritas yang melihat potensi program MBG sebagai peluang pemberdayaan ekonomi lokal. Beberapa responden mengusulkan agar pengadaan makanan bisa melibatkan UMKM lokal atau kelompok ibu-ibu PKK di sekitar sekolah, sehingga bukan hanya siswa yang mendapat manfaat, tetapi juga komunitas sekitar. Sayangnya, inisiatif seperti ini belum mendapatkan perhatian dalam desain kebijakan nasional. Hal ini tampak dari ketiadaan kode “pelibatan UMKM lokal” dalam jaringan utama, yang bisa diartikan bahwa dimensi ekonomi berbasis komunitas belum terintegrasi dalam narasi besar pelaksanaan MBG.

Isu lingkungan juga menjadi dimensi penting yang muncul dalam temuan analisis. Pemborosan makanan tidak hanya menimbulkan masalah etika dan efisiensi, tetapi juga berdampak serius terhadap lingkungan. Makanan yang dibuang akan menghasilkan emisi metana saat membusuk di tempat pembuangan akhir, yang pada akhirnya memperparah krisis iklim. Sayangnya, dari hasil analisis, kesadaran akan dimensi lingkungan ini masih rendah baik dari sisi perancang maupun pelaksana program. Narasi-narasi yang menyinggung isu lingkungan seperti “food waste itu nyumbang emisi karbon juga” atau “makanan dibuang ke sungai atau TPA” hanya muncul dalam jumlah terbatas. Hal ini menunjukkan bahwa integrasi antara kebijakan pangan, pendidikan, dan kelestarian lingkungan masih sangat lemah.

Dalam konteks keberlanjutan, muncul pula pertanyaan mengenai durasi dan komitmen jangka panjang terhadap program MBG. Sejumlah responden menyampaikan kekhawatiran bahwa program ini hanya akan berjalan dalam siklus politik lima tahunan, tanpa ada kepastian keberlanjutan pasca-pergantian pemerintahan. Kode “ketergantungan pada politik anggaran” dan “program musiman”

memperlihatkan bahwa masyarakat menginginkan adanya jaminan bahwa program semacam ini tidak akan berhenti di tengah jalan. Tanpa ada kerangka hukum yang kuat dan mekanisme pengawasan berkelanjutan, program MBG dikhawatirkan akan bernasib serupa dengan program-program populis lainnya yang hanya ramai di awal, lalu menghilang tanpa evaluasi menyeluruh.

Dengan melihat hasil analisis tersebut, jelas bahwa program Makan Bergizi Gratis memerlukan pendekatan lintas sektoral dan berbasis bukti (evidence-based policy). Beberapa rekomendasi dapat disusun untuk memperbaiki desain dan pelaksanaan program, antara lain:

- 1) Perbaiki sistem distribusi dan penjadwalan agar makanan diterima siswa dalam keadaan segar, hangat, dan layak konsumsi.
- 2) Pelibatan aktif pihak sekolah, orang tua, dan komunitas lokal dalam menentukan menu makanan agar sesuai dengan kebutuhan dan preferensi siswa.
- 3) Penerapan sistem evaluasi dan umpan balik dua arah yang memungkinkan perbaikan berkelanjutan berdasarkan data real-time dan temuan lapangan.
- 4) Integrasi program MBG dengan kebijakan lingkungan dan pengurangan limbah, seperti kerja sama dengan bank makanan atau teknologi pengolahan limbah makanan.
- 5) Pembentukan tim independen untuk pengawasan anggaran dan efektivitas program yang melibatkan akademisi, LSM, dan masyarakat sipil.

Dengan menerapkan pendekatan tersebut, program MBG dapat dialihkan dari sekadar proyek penyediaan makanan menjadi alat strategis untuk memperkuat ketahanan pangan nasional, memberdayakan komunitas lokal, dan menciptakan kebiasaan makan sehat di kalangan pelajar. Maka dari itu, evaluasi menyeluruh terhadap program ini bukan hanya penting, tapi juga mendesak, agar setiap rupiah anggaran negara benar-benar bermakna dalam meningkatkan kualitas hidup generasi muda Indonesia.

Kesimpulan

Program Makan Bergizi Gratis (MBG) yang dirancang untuk meningkatkan kualitas gizi anak sekolah di Indonesia, pada praktiknya, menghadapi tantangan serius terkait dengan pengelolaan makanan dan food waste. Meskipun bertujuan mulia untuk mengurangi angka stunting dan mendukung pemberdayaan ekonomi lokal, program ini masih belum terintegrasi dengan baik dalam kerangka pengurangan food waste. Sisa makanan yang tidak dikonsumsi oleh siswa menjadi masalah yang cukup besar, dan hal ini menunjukkan bahwa desain program belum sepenuhnya mempertimbangkan efisiensi pengelolaan pangan, dari penyajian hingga distribusi, serta keberlanjutan konsumsi.

Dari perspektif ketahanan pangan, program ini memperlihatkan potensi dalam memenuhi kebutuhan gizi dasar bagi sebagian besar anak sekolah, tetapi terdapat kelemahan signifikan dalam hal akses, pemanfaatan, dan stabilitas. Akses yang tidak merata, kualitas gizi yang kurang optimal, dan ketidaksesuaian menu dengan selera anak menunjukkan bahwa ketahanan pangan dalam konteks program ini belum tercapai sepenuhnya. Selain itu, pengelolaan food waste yang lemah memperburuk dampak program terhadap lingkungan dan menambah biaya yang tidak perlu.

Secara keseluruhan, untuk mewujudkan keberhasilan program MBG dalam kerangka ketahanan pangan dan pengurangan food waste, diperlukan perbaikan mendalam pada aspek desain program, pengelolaan distribusi yang lebih efisien, serta penguatan sistem pengelolaan limbah makanan. Evaluasi dan pemantauan yang lebih baik harus dilakukan untuk mengidentifikasi dan mengatasi hambatan-hambatan yang ada. Dengan demikian, program ini dapat lebih efektif dalam mencapainya tujuan jangka panjang untuk meningkatkan kualitas gizi dan ketahanan pangan di Indonesia secara berkelanjutan.

Daftar Pustaka

Sumber dari publikasi jurnal:

- Gede Agung, A. A. (2015). PENGEMBANGAN MODEL WISATA EDUKASI-EKONOMI BERBASIS INDUSTRI KREATIF BERWAWASAN KEARIFAN LOKAL UNTUK MENINGKATKAN EKONOMI MASYARAKAT, 4(2), 4.585-597. DOI: <https://doi.org/10.23887/jish-undiksha.v4i2.6380>
- Hidayat, S. I., Ardhan, Y. H., & Nurhadi, E. (2020). Kajian food waste untuk mendukung ketahanan pangan. <https://doi.org/10.21107/agriekonomika.v9i2.8787>
- Kamil, A. (2015). Media Trend (Journal of Economic & Development Studies). Industri Kreatif Indonesia: Pendekatan Analisis Kinerja Industri, 10(2). DOI: <https://doi.org/10.21107/mediatrend.v10i2.946>
- Karso, A. J. (2025). PROGRAM MAKAN BERGIZI GRATIS, PRESIDEN PRABOWO SUBIANTO MENUJU INDONESIA EMAS 2045. Eureka Media Aksara Repository. Retrieved July 4, 2025, from <https://repository.penerbiteureka.com/media/publications/596423-program-makan-bergizi-gratis-presiden-pr-d5024031.pdf>
- Leonandri, D., & Rosmadi, M. L. N. (2018, November 19). SINERGITAS DESA WISATA DAN INDUSTRI KREATIF DALAM MENINGKATKAN PEREKONOMIAN MASYARAKAT, 1(2), 13-18. URL: <https://journals.upi-yai.ac.id/index.php/IKRAITH-EKONOMIKA/article/view/377>
- Ningsih, C. (2014, April). Sinergitas Industri Kreatif Berbasis Pariwisata dengan Strategi Pembangunan Industri Nasional Menuju Globalisasi (The Synergy of Tourism-Based Creative Industry with National Industry Development Strategy Toward Globalization). Jurnal Manajemen Resort & Leisure (JUREL), 11(1). <https://ejournal.upi.edu/index.php/jurel/article/download/2903/1933>
- Nizmi, Y. E., Olivia, Y., Retnaningsih, U.O., Meilani, N. L., Jesscia, A., & Iqbal (n.d.). FOOD WASTE DAN TANTANGAN KEBERLANJUTAN KONSUMSI DAN PRODUKSI PANGAN DALAM KERANGKA ASEAN SOCIO CULTURAL COMMUNITY BLUEPRINT 2025. <https://journal.uir.ac.id/index.php/jdis/article/view/14609>
- Sarker, A., Ahmmed, R., Ahsan, S. M., Rana, J., Ghosh e, d. M. K., & Nandi, R. (2025, November 13). Acomprehensive review of food waste valorization for the sustainable management of global food waste. <https://publications.jrc.ec.europa.eu/repository/handle/JRC133949>

Sarker, A., Ahmmed, S. M, R., Rana, A. J., Ghosh, M. K., & Nandi, R. (2025, November 13). A comprehensive review of food waste valorization for the sustainable management of global food waste. *Food & Function*. DOI:

<https://doi.org/10.1039/d3fb00156c>

Triono, & Nizmi, Y. E. (2024). Food Waste dalam Konstelasi Empat Pilar Keamanan Pangan di Kawasan Asia Tenggara. DOI:10.24042/tps.v20i2.25065

Sumber dari buku:

Gustavsson, J., Cederberg, C., Sonesson, U., van Otterdijk, R., & Meybeck, A. (2011). Global food losses and food waste – extent, causes and prevention. Food and Agriculture Organization of the United Nations.

Moelyono, M. (2010). Menggerakkan ekonomi kreatif: antara tuntutan dan kebutuhan (1st ed.). Rajawali Press.

Nazir, M. (1988). Metode Penelitian. Ghalia Indonesia.

The Global Goals. (2024). Goal 12: Responsible consumption and production. Diakses dari situs UN Global Goals

United Nations Environment Programme (UNEP). (2024).

United Nations (2023). Sustainable Development Goal 2: Zero Hunger.

Sumber dari website:

Gabungan Eksportir Kopi Indonesia (GAEKI). (2019). Retrieved Agustus 27, 2019, from <https://gaeki.or.id/Areal%20dan%20Produksi/>

Simon, G.-A. (2012, March 19). History of Food Security. Food and Agriculture Organization of the United Nations. Retrieved July 4, 2025, from <https://www.fao.org/fileadmin/templates/ERP/uni/F4D.pdf>

SINGER, H., & Keynes, J. M. (2007). World Food Security: A History since 1945. National Academic Digital Library of Ethiopia. Retrieved July 4, 2025, from <http://ndl.ethernet.edu.et/bitstream/123456789/27327/1/104.pdf.pdf>

Suparwoko, W. (2008, Juli). Pengembangan Ekonomi Kreatif Sebagai Penggerak Industri Pariwisata Kabupaten Purworejo, Jawa Tengah.

https://www.researchgate.net/publication/273122669_Pengembangan_Ekonomi_Kreatif_Sebagai_Penggerak_Industri_Pariwisata_Kabupaten_Purworejo_Jawa_Tengah